

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berakhirnya Perang Dunia II menjadi awal dari penggunaan Konstitusi 1947 yang "diberikan" oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Konstitusi ini menandai berakhirnya Jepang yang ekspansionis-imperialis dan beralih menjadi Jepang yang menjunjung tinggi nilai pasifisme dalam setiap konflik yang dihadapi. Hal ini berlangsung hingga pada tahun 1991, saat Perdana Menteri Kiichi Miyazawa mengeluarkan amandemen konstitusi yang mengizinkan keikutsertaan tentara bela diri Jepang, SDF (*Self Defence Force*) untuk tugas penyelesaian konflik dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Saat itu kemudian tentara Jepang lebih dikenal sebagai PKO (*Peace Keeping Operations*). Pendapat pun banyak bermunculan ketika PKO tersebut diterjunkan dalam membantu misi perdamaian PBB. Bagi negara-negara yang pernah berurusan atau bermasalah dengan Jepang pada masa PD II, mereka mengkhawatirkan hal tersebut sebagai bentuk kebangkitan kembali sifat militerisme Jepang. Namun, pendapat positif muncul dari mantan lawan Jepang pada PD II, Amerika Serikat. Amerika Serikat justru mendukung usaha bantuan Jepang dalam menurunkan pasukannya demi menjaga stabilitas dan keamanan yang selama ini hanya membantu hanya dari segi finansial.

Pada masa awal kepemimpinan PM Shinzo Abe (2006-2007), keinginan untuk mengamandemen pasal 9 semakin terlihat walaupun belum menyentuh tujuan untuk perubahan pada klausul yang ada pada pasal 9 Konstitusi 1947 tersebut. Pada Januari 2007, lembaga pertahanan yang telah dibentuk Jepang, yang berada dalam naungan kementerian pertahanan, dirubah dengan membentuk jabatan baru, yaitu Penasehat Keamanan Nasional – suatu jabatan yang kewenangannya setingkat menteri dalam kabinet (Hendrajit, 2007). Era Abe ini juga diwarnai oleh dukungannya terhadap undang-undang anti-terorisme yang didasarkan

pada aliansi keamanan AS-Jepang. Kemudian, pada seiring berjalannya waktu, pada masa PM Yasuo Fukuda (2007-2008) isu amandemen pasal 9 menjadi isu yang cukup *urgent* bagi Jepang yang sangat ingin untuk menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan kondisi damai dan aman tidak hanya bagi Jepang sendiri tetapi juga bagi keamanan internasional. Tak heran jika misi pasukan Jepang di Afghanistan untuk mendukung operasi Amerika Serikat masih menjadi prioritas bagi PM Fukuda. Untuk itu, perpanjangan undang-undang anti-terorisme menjadi penting bagi PM Fukuda dalam membangun kapasitas militer Jepang secara tidak langsung melalui keterlibatannya dalam operasi-operasi perdamaian. Dengan begitu, maka secara tidak langsung amandemen pasal 9 akan bergulir dengan sendirinya. Keinginan Fukuda untuk membentuk militer Jepang tidak hanya sebatas sebagai pasukan bela diri, tetapi juga adanya kemungkinan membentuk pertahanan kolektif (*collective defense*) (Hendrajit, 2007). Ini merupakan perwujudan dari semakin besarnya keinginan Jepang, terutama dari kelompok kanan/kaum konservatif (LDP), untuk membangun kembali militernya sebagai basis pertahanan dan keamanan Jepang.

Potensi ancaman merupakan satu hal yang juga mendasari keinginan Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini. Berkembangnya Tiongkok dalam segi militer dan juga ekonomi menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang untuk menjadikan reinterpretasi ini menjadi suatu hal yang *urgent*. Hal ini didasari pada dalam segi jumlah, alutsista yang dimiliki oleh Jepang jauh dibawah jumlah alutsista yang dimiliki oleh Tiongkok. Selain itu berbagai uji coba rudal balistik nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara juga menjadi perhatian bagi Jepang yang berusaha untuk mencegahnya jika sewaktu-waktu memasuki wilayah teritorial Jepang. Kemudian konflik yang tidak berakhir dalam perebutan Kepulauan Takeshima/Dokdo cukup membuat Jepang merasa terbatas karena tidak dapat membuat gertakan secara kekuatan militer karena militer mereka dilarang untuk keluar dari wilayah mereka.

Selain potensi ancaman, eksistensi militer Amerika Serikat di Okinawa dapat dikatakan bagai buah simalakama bagi Jepang. Adanya militer Amerika Serikat merupakan suatu anugerah bagi Jepang karena jika sewaktu-waktu Jepang diserang oleh Tiongkok dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh Jepang dan juga jika sewaktu-waktu terjadi konflik militer dengan Korea Utara yang dapat mengirimkan rudal berhulu ledak nuklir yang akan membuat kerusakan cukup parah jika meledak di wilayah Jepang. Disisi lain, warga Okinawa cukup dibuat resah dengan oknum militer Amerika Serikat yang melakukan berbagai hal yang cukup meresahkan seperti memerkosa warga lokal, melakukan perampasan, dan juga minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan pemaksaan yang disertai kekerasan kepada warga lokal di sekitar pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa.

Hal yang utama pada usaha reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 adalah pada komitmen Jepang untuk memberantas terorisme dan pada perubahan orientasi terorisme di era modern ini. Reinterpretasi Pasal 9 ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari komitmen Jepang untuk mendukung propaganda *war on terror* yang dilakukan Amerika Serikat sejak era Presiden George W. Bush untuk membalaskan dendam pada berbagai rangkaian teror yang dilakukan oleh al-Qaeda terutama setelah peristiwa 9/11 yang benar-benar membuat Amerika Serikat terpukul dan membuat orientasi dunia pada terorisme berubah. Kemudian pada Oktober 2003, Osama bin Laden mengirimkan ancaman bagi seluruh negara yang berpartisipasi dalam operasi militer di Iraq. Pada saat itu, JSDF juga dikirimkan ke Iraq dalam kondisi khusus yang melarang mereka untuk berperan dalam peperangan. Bin Laden mengatakan bahwa negara-negara ini, termasuk Jepang yang juga disebutkan olehnya, akan mengalami serangan balasan dari al-Qaeda pada saat dan pada tempat yang tepat. Kemudian, beberapa serangan dilakukan ke warga negara Jepang di Iraq.

Pada November 2003, dua aparat pemerintahan Jepang dibunuh di selatan Kota Tikrit. Pada Mei 2004, dua jurnalis asal Jepang dibunuh.

Munculnya ISIS di Suriah dan Iraq juga menjadi perhatian utama dari Pemerintah Jepang. Pada Agustus 2014, Haruna Yukawa, seorang yang merupakan jurnalis sekaligus dokter diculik dan ditawan di pinggiran Kota Aleppo. Kemudian pada Oktober 2014, Kenji Goto, seorang jurnalis lepas, diculik di Raqqa. Kemudian pada 20 Januari 2015, ISIS merilis video ancaman untuk mengeksekusi dua warga negara Jepang yang menjadi tahanan mereka yaitu Haruna Yakawa dan Kenji Goto. Permintaan ISIS adalah \$100 juta untuk masing-masing orang. Aksi ini adalah reaksi mereka atas kebijakan Jepang yang berkomitmen untuk menyumbang \$200 juta dalam bentuk bantuan non-militer pada negara-negara yang melawan ISIS. Karena batas waktu atas permintaannya sudah terlewati, ISIS kemudian mengeksekusi kedua orang ini.

Reinterpretasi Pasal 9 pada Konstitusi 1947 ini juga merupakan bentuk keseriusan Jepang dalam upaya penanggulangan terorisme di kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Bom Bali I pada 2002 menjadi penanda dimulainya pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Dalam lingkup Asia Tenggara, sebenarnya sudah ada satu kerjasama yang terjalin antara Jepang dengan member-state ASEAN seperti ASEANAPOL, ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) plus Japan, lalu ASEAN *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dan juga ASEAN-Japan *Cybercrime Dialogue* dan juga ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue*. Untuk ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue* pemimpin-pemimpin yang ada di Asia Tenggara dan Jepang setuju untuk meningkatkan dan mengubah ASEAN-Japan *Counter Terrorism Dialogue* menjadi ASEAN-Japan *Dialogues on Countering Terrorism and Transnational Crime* terkait perubahan pola keamanan baik di kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran ISIS di Asia Tenggara juga menjadi perhatian Jepang karena dapat sewaktu-waktu masuk ke wilayahnya. *Battle of Marawi* merupakan konflik bersenjata yang terjadi selama lima bulan di Marawi, Filipina yang dimulai pada 23 Mei 2017, yang melibatkan angkatan bersenjata Filipina dibantu MNLF melawan militan yang terafiliasi ISIS, termasuk kelompok Maute dan Abu Sayyaf. Kemudian keterlibatan dua warga keturunan Jepang dalam ISIS juga menjadi kekhawatiran bagi Jepang. Dr. Hassan Ko Nakata yang merupakan warga negara Jepang dan Saifullah Ozaki yang merupakan WN Bangladesh keturunan Jepang adalah dua orang yang dianggap memiliki kaitan dengan ISIS. Saifullah Ozaki merupakan otak serangan teror yang terjadi di Dhaka pada Juli 2016 yang menewaskan 29 orang.

4.2. Saran

Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan penelitian lain untuk melengkapi penelitian ini. Pada selanjutnya dapat dikaji keseriusan Jepang dalam pemberantasan terorisme dan apakah Jepang apakah akan berperan jauh lebih besar dalam usaha *war on terror* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya pasca reinterpretasi Pasal 9 yang akan bergulir pada 2020 nanti. Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas jangkauan penelitian yang bukan hanya pemberantasan terorisme, namun juga peranan Jepang dalam pemberantasan *transnational organized crime* baik di kawasan Asia ataupun di seluruh dunia.